

PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENANGANAN KONFLIK ANTARA ORGANISASI MASYARAKAT PEMUDA PANCASILA DAN FORUM BETAWI REMPUG DI JAKARTA TAHUN 2016-2018

THE ROLE OF THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF DKI JAKARTA IN CONFLICT HANDLING BETWEEN PEMUDA PANCASILA AND FORUM BETAWI REMPUG AS MASS ORGANIZATIONS IN JAKARTA IN 2016-2018

I Gusti Ayu Ratih Charisma Dewi Atmika¹, M. Adnan Madjid², Ichsan Malik³

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas
Pertahanan
(chaca.atmika@gmail.com, madjun_8788@yahoo.com, ichsanmalik@gmail.com)

Abstrak – Keberadaan organisasi kemasyarakatan seharusnya merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tingkat keberagaman sosial yang tinggi, ormas yang berada di Jakarta menjadi beragam mulai dari ormas keagamaan, profesi, kepemudaan dan lainnya. Namun keberagaman ormas tersebut seringkali bergesekan yang diakibatkan oleh perseteruan pribadi serta kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran dan upaya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani konflik antara organisasi massa Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug (FBR) yang sering terjadi di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pengambilan data meliputi teknik wawancara, penelitian lapangan dan studi pustaka yang melibatkan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Kemendagri, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta serta ormas Pemuda Pancasila dan FBR untuk memberikan fakta-fakta yang akurat dalam objek penelitian. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa: (1) Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta memiliki peran dalam hal pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan ormas melalui program-programnya yang bernuansa sosialisasi dan edukasi, (2) upaya penanganan konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR yang meliputi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaannya dirasa belum optimal karena tidak tepat sasaran. Sehingga pemerintah harus mereformulasikan program pembinaan ormas hingga pemantauan dan penanganan konflik dengan menambahkan subjek sasaran, yaitu level akar rumput.

Kata Kunci: Forum Betawi Rempug (FBR), Konflik, Ormas, Pemerintah, Pemuda Pancasila

Abstract – The existence of social organizations should be a form of participation in development for the achievement of the objectives of the Unitary Republic of Indonesia based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. With a high level of social diversity, mass organizations in Jakarta are diverse starting from religious, professional organizations, youth and others. But the diversity of these organizations often rubbed together due to personal feuds and basic needs that were not met. The purpose of this study was to analyze the role and efforts of the Provincial Government of DKI Jakarta in dealing with conflicts between Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug (FRB) mass organizations which often occurs in Jakarta. The research uses descriptive qualitative methodology with data collection including interview techniques, field research and literature studies involving the Bakesbangpol of the Province of DKI Jakarta, Ministry of Home Affairs,

¹ Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

² Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

³ Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

Satpol PP of the Province of DKI Jakarta and also Pemuda Pancasila and FBR organizations to provide accurate facts in the object of research. The results found show that: (1) Bakesbangpol of the Province of DKI Jakarta has a role in the management, fostering and empowering mass organizations through its programs that have nuances of socialization and education, (2) efforts to handle conflicts between Pemuda Pancasila and FBR organizations covering activities coaching and empowerment in the implementation is not optimal because it is not on target. So the government must reformulate the organization's guidance program to monitor and handle conflicts by adding target subjects, namely the grassroots level.

Keywords: Conflict, Forum Betawi Rempug (FBR), Government, Mass Organization, Pemuda Pancasila

Pendahuluan

Sejak awal reformasi, keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan suatu fenomena aktual yang ada di Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, secara definitif ormas diartikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴.

Dalam kehidupan negara demokrasi, ormas sebagai lembaga non pemerintah sangat penting karena merupakan bentuk peran serta

masyarakat dalam pembangunan bangsa Indonesia. Secara filosofis, ormas tidak hanya berupa perkumpulan masyarakat, tetapi juga mewadahi nilai kebebasan berpendapat dan nilai sosial serikat masyarakat. Dengan begitu ormas diharapkan mampu menjadi perekat pembangunan sosial bangsa Indonesia melalui proses pembentukan kesadaran penduduk dalam tataran landasan dan tujuan yang sama. Kesamaan visi yang dicita-citakan dalam pelaksanaan tujuan kegiatan ini memuat kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran melalui wadah kelompok ormas.

Menurut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), disampaikan bahwa organisasi merupakan sebuah simpul pemersatu elemen bangsa, kehadiran ormas khususnya di Jakarta tentu menjadi penting. Dengan adanya tingkat keberagaman sosial yang tinggi di

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Tabel 1. Kronologi Konflik Antara Pemuda Pancasila dan FBR (2016-2018)

No.	Tahun	Lokasi	Kronologi Konflik	Dampak
1.	2016	Kembangan, Jakarta Barat	Keributan di Perum Puri Beta Ciledug Tangerang, dalam kejadian tersebut anggota ormas FBR telah mengalami pembacokan. Kejadian tersebut merembet ketika anggota PP melihat di TKP tiba-tiba dari arah belakang ditendang sehingga terjatuh kemudian di bacok oleh pelaku sekitar 20 orang.	Seorang anggota PP bernama Muhamad Aji Khadafi mengalami luka bacok pada leher, lengan, dagu dan punggung hingga dibawa ke Rumah Sakit Medika Lestari Cileduk.
2.	2016	Setiabudi, Jakarta Selatan	Dua orang anggota PP sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dari arah Manggarai menuju Dukuh Atas. Ketika berhenti di lampu merah depan Guntur, tiba-tiba didatangi oleh rombongan pawai motor yang mengenakan atribut ormas FBR. Kemudian mereka mengeroyok dan membacok anggota PP menggunakan celurit	Seorang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka bacok. Di kepala dan dibawa ke RSCM untuk dilakukan perawatan.
3.	2016	Setiabudi, Jakarta Selatan	5 anggota FBR sedang mengendarai sepeda motor untuk menghadiri milad FBR di Jakarta Utara tiba-tiba dikeroyok sehingga pergelangan tangan sebelah kiri terkena senjata tajam	Seorang anggota FBR terkena sabetan senjata tajam dan dirawat di RSCM.
4.	2016	Mampang	50 anggota ormas FBR melakukan aksi lempar baru yang berujung pada perusakan rumah anggota Pemuda Pancasila. Massa Pemuda Pancasila melakukan strategi bertahan dengan membawa senjata tajam dan berkonvoi menggunakan sepeda motor dan balas merusak pos FBR yang tidak jauh lokasinya.	Rusaknya rumah milik H. Tambul yang merupakan pos Pemuda Pancasila.
5.	2016	Cempaka Putih	Sekitar 40 orang anggota FBR merusak mobil bermotif Pemuda Pancasila yang bernama Mastur.	Perusakan terhadap 1 mobil dan 2 motor di bengkel milik Mastur. Seorang pemuda bernama Bayu Satrioutomo mengalami pukulan dan luka bacok pada lengan kiri oleh anggota FBR.
6.	2017	Pesanggrahan, Jakarta Selatan	Rombongan ormas PP dari DPC Cengkareng yang akan menghadiri pelantikan Ketua PAC Pesanggrahan tiba-tiba dihadang	Seorang anggota PP, Didi Angga Priambodo dikroyok dan dianiaya.

			kelompok FBR dan memukuli secara beramai-ramai.	
7.	2017	Kebayoran Lama	Puluhan orang beratribut Pemuda Pancasila menyerang markas FBR di Kebayoran Lama dengan menenteng senjata tajam.	Dua orang terluka dan 2 buah mobil rusak. Seorang korban mengalami luka di bagian kepala akibat dihantam menggunakan balok kayu.
8.	2018	Gandaria dan Cipulir	Ormas FBR termakan isu di media sosial mengenai aksi pencabutan dan pembakaran bendera ormas di Tangerang dan isu mengenai adanya penyerangan di pos oleh ormas Pemuda Pancasila, sehingga akhirnya melakukan aksi balasan yang kemudian menimbulkan bentrok berupa tawuran yang meluas di sejumlah wilayah di Jakarta Selatan.	Banyaknya korban luka dan kerugian materil.

Sumber: Direktorat Intelkam Subdit VI Polda Metro Jaya (2018) Diolah peneliti

Jakarta membuat ormas yang ada di Jakarta pun menjadi beragam, mulai dari ormas keagamaan, kepemudaan, profesi dan sebagainya. Berdasarkan data Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2019 terdaftar 470 organisasi kemasyarakatan termasuk ormas Pemuda Pancasila dan FBR.

Namun, keberadaan beberapa ormas seringkali bergesekan yang diakibatkan oleh perseteruan pribadi serta kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Begitupun pada ormas Pemuda Pancasila dan FBR di Jakarta. Pada pemberitaan di media massa, kedua

ormas besar ini tercatat seringkali mengalami bentrokan secara berulang dari tahun ke tahun⁵. Berikut beberapa kronologis bentrokan yang terjadi antara Pemuda Pancasila dan FBR dari tahun 2016 hingga 2018.

Beberapa bentrokan yang terjadi dari tahun ke tahun yang melibatkan ormas Pemuda Pancasila dan FBR kerap terjadi karena adanya rasa kesetiakawanan yang tinggi. Idealnya, keberadaan ormas-ormas tersebut adalah untuk membantu pemerintah dan mengemban peran penting dalam membangun bangsa. Namun yang terjadi

⁵ Adi Briantika, "Serangan Pemuda Pancasila ke Markas FBR & Warisan Dendam di Jakarta" dalam <https://tirto.id/serangan-pemuda->

[pancasila-ke-markas-fbr-warisan-dendam-di-jakarta-cYPb](https://tirto.id/serangan-pemuda-pancasila-ke-markas-fbr-warisan-dendam-di-jakarta-cYPb), 14 September 2018, diakses pada 22 Januari 2020.



Gambar 1. Lambang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya
Sumber: Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta (2019)

adalah ormas-ormas tersebut seringkali terpecah dalam konflik dan meresahkan warga. Hal ini tentu menjadi ancaman terhadap kondisi keamanan negara. Jika dibandingkan oleh parlemen dan partai politik, ormas memiliki peran vital dalam memberikan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah. Parlemen dan partai politik tidak mungkin mengambil peran-peran sepenuhnya untuk mengevaluasi pemerintah, maka ormas juga memiliki peran atas hal tersebut.

Selama konflik yang berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2018, masing-masing pemimpin kedua ormas tersebut sudah pernah melakukan komunikasi di tingkat pimpinan. Namun, pada tingkat bawah ormas terkadang tidak dapat menahan diri dan masih ada komunikasi yang kurang di antara pimpinan ormas dan anggotanya di lapangan. Mediasi yang telah dilakukan oleh Polisi pun dirasa

belum juga efektif untuk menghentikan konflik secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan masih terus terjadinya konflik secara berkepanjangan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan fenomena di atas, maka diperlukan peran pemerintah daerah yang tepat dan terencana untuk menanggulangi permasalahan kelompok khususnya konflik antar ormas di Jakarta. Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, penanganan konflik didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik⁶.

Di Indonesia, terdapat suatu badan pemerintahan yang menjalankan upaya integrasi dan manajemen konflik antar ormas yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015, Bakesbangpol merupakan sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial⁷. Tiga tataran yang diusung

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015.

yakni efektivitas, keterpaduan dan sinergi. Dalam perspektif peneliti, Bakesbangpol menjadi instansi utama yang bersinggungan besar dengan keberadaan dan dinamika konflik antar ormas. Bakesbangpol menjalankan tugas dan fungsinya dengan dibentuknya struktur komando kewaspadaan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan pemantauan ormas.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah Bakesbangpol sebagai lembaga yang berkapasitas dalam fasilitasi dan resolusi. Lokasi subjek penelitian yang dipilih yakni pada tingkat Provinsi DKI Jakarta yang merupakan provinsi sentral pemerintahan dengan segala kompleksitasnya. Jakarta sebagai daerah yang juga menjadi tempat kedudukan Ibukota negara memiliki beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang kompleks. Kenyataan tersebut bersumber dari berbagai faktor yang meliputi luas wilayah, jumlah populasi yang tinggi dan komposisi masyarakat yang majemuk dengan muatan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Utamanya menyangkut dinamika kelompok ormas yang bahkan acapkali pecah dalam berbagai bentuk konflik.

Oleh karena itu, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berperan penting dalam upaya menciptakan situasi kondisi politik yang kondusif untuk mendukung penguatan persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong proses peningkatan pemahaman demokrasi dan HAM yang berdasarkan nilai-nilai luhur ideologi bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Terkait dengan penelitian ini, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan fungsi yang diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang mencakup perencanaan, pencegahan konflik, pembinaan dan koordinasi. Tugas dan fungsi yang dijalankan dengan kapasitas lembaga mengacu pada visi dan misi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat juga bahwa Bakesbangpol Provinsi berada langsung di bawah naungan Pemerintah Provinsi. Adapun implementasi yang telah berjalan selama ini perlu dioptimalkan lagi utamanya pada tahap preventif dan rekonsiliasi, mengingat masih tingginya konflik kepentingan dan kurangnya rasa toleransi dalam masyarakat, sehingga isu gesekan kelompok khususnya ormas mudah

mengemuka sebagai konflik, lalu berujung pada persoalan ketentraman dan ketertiban di Jakarta. Tahap rekonsiliasi ini dianggap penting sebab masih terdapat endapan stigma dan stereotipe antar ormas, sehingga konflik masih terus saja berulang.

Stabilitas politik pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum. Beberapa permasalahan utama yang terkait dengan *excess* dan *dispute* yang potensial terjadi perlu diantisipasi dengan adanya perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara, sebab terwujudnya lingkungan yang bebas dari berbagai gangguan dan konflik sosial adalah modal dasar bagi pembangunan.

Mengacu pada latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan sebuah permasalahan “Peran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Dalam

Penanganan Konflik Antara Ormas Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug (FBR) di Jakarta Tahun 2016-2018” yang menjadi dasar pembahasan dengan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR di Jakarta tahun 2016-2018?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR di Jakarta tahun 2016-2018?

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, digunakan beberapa teori yang mendukung yakni teori peran untuk menjawab bagaimana peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR di Jakarta. Serta beberapa teori konflik yakni Model Kupas Bawang oleh Fisher dan Patton, Tahapan Model Glasl's dan teori Kerangka Dinamis oleh Ichsan Malik untuk menjawab upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta

dalam penanganan konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR di Jakarta.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, terdapat beberapa metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara mendalam, Teknik wawancara atau bertatap muka antara satu atau lebih dari dua orang dengan mengajukan beberapa studi kasus⁸. Proses penelitian kualitatif menitikberatkan sisi kedalaman dengan melibatkan dinamika pertanyaan, serta interpretasi atas kompleksitas persoalan berlandaskan pada kerangka konseptual yang telah ditentukan⁹.

Dalam pendekatan deskriptif kualitatif, berbagai data yang berupa kutipan naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya terkait dengan penelitian mengenai penanganan konflik yang terjadi antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR di Jakarta kemudian menghasilkan sebuah data yang

dipaparkan secara deskriptif melalui narasi dan penggambaran dari data-data yang telah didapatkan sebelumnya.

Untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian, lokasi yang dijadikan penelitian meliputi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Kemendagri, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Kantor Ormas Pemuda Pancasila dan FBR serta Masyarakat Umum.

Pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik *purposive sampling*¹⁰, dengan melakukan penggalan informasi kepada subjek primer dan beberapa narasumber tambahan yang relevan dan kredibel.

Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan, Kasubdit Bidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial dari Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Kepala Seksi Monitoring Evaluasi Ormas, *Support Analys* Subdit Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Kasubdit Penanganan Konflik Direktorat Kewaspadaan Nasional dari Kemendagri, Kepala Bidang Penegakkan dan

⁸ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 73.

⁹ Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (ed. 22)*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 5.

¹⁰ Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Penindakan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Komandan Komando Inti Jakarta Pusat dari ormas Pemuda Pancasila, Sekretaris Bendahara Cabang Jakarta Utara dari ormas FBR dan Ketua Forum RT/RW Jakarta Barat.

Dalam mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, digunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara langsung dan studi literatur. Selanjutnya penelitian akan memperoleh data yang representatif dengan menggunakan metode yang mampu mengungkap data yang diperlukan dengan metode wawancara, dokumentasi serta studi literatur.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama¹¹.

Dalam menuju keabsahan data, penelitian ini menggunakan strategi

triangulasi. Menurut Creswell, triangulasi merupakan teknis mengumpulkan sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren¹².

Pengujian validitas data dilakukan menggunakan triangulasi dengan mengumpulkan data mengenai peran pemerintah dalam menangani konflik yang terjadi antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR di Jakarta. Selain itu, dilakukan juga penyesuaian data yang diperoleh terkait tema penelitian kepada orang-orang atau instansi yang terlibat dalam perumusan kebijakan terkait penanganan konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Penanganan Konflik Antara Ormas Pemuda Pancasila dan FBR Tahun 2016-2018

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, penanganan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan

¹¹ Sujarweni. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), hlm. 31.

¹² John W. Creswell. *Educational Research, Planning, Conducting and Evaluating*,

Qualitative and Quantitative Approach, (London: Sage Publications, 2008), hlm. 286.

terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik¹³.

Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dikatakan sebagai unsur lembaga pemerintah daerah yang strategis mengingat lokasi Jakarta sebagai Ibukota negara. Dengan begitu secara esensial penelitian ini memandang lembaga tersebut memiliki keunggulan sebagai lembaga holistik manajemen dan resolusi konflik demi terbentuknya kesatuan di Jakarta. Berbagai isu keamanan di Jakarta dapat membawa dampak ke dalam lingkungan strategis (lingstra) keamanan nasional, salah satunya yakni isu konflik antara ormas besar di Jakarta yaitu Pemuda Pancasila dan FBR yang terjadi secara terus menerus dan menjadi urusan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Bakesbangpol sebagai lembaga pemerintahan bersinggungan langsung dengan persoalan sipil dan konflik sosial di masyarakat.

Pasca reformasi, supremasi sipil mengemuka dan problem sosial hadir dalam nuansa komunitas sipil. Sejak era

tersebut ormas di Jakarta mulai bermunculan dalam berbagai bentuk. Dalam pengelolaan yang belum optimal inilah terjadi implikasi berbentuk seteru kelompok dan *stereotype* golongan antar ormas yang menjadi fenomena keseharian di Jakarta, bahkan menjadi kebiasaan dan pelabelan yang juga diamini oleh ormas bersangkutan. Sehingga demikian perlu dilakukan analisis terhadap peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Penanganan Konflik Antara Ormas Pemuda Pancasila dan FBR di Jakarta.

Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan ormas. Pada tataran pengelolaan, Bakesbangpol dituntut untuk dapat mengelola ormas-ormas agar mampu kooperatif sehingga membawa implikasi damai dan potensi konflik antar ormas dapat diminimalisasi. Kegiatan teknik pengelolaan ormas mengacu pada tugas pokok Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1: “merumuskan kebijakan teknis,

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi pemantapan integrasi bangsa, pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan¹⁴.”

Kapasitas Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga pemerintahan dapat terlihat pada implementasi tugas pokok dan fungsi. Implementasi merupakan proses yang menghantarkan suatu tujuan atau hasil sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun 2016-2018, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan teknis tata kelola keberadaan ormas dan penanganan konflik antar ormas di Jakarta yang di dalamnya termasuk ormas Pemuda Pancasila dan FBR.

Mengacu pada tiga unsur penting proses implementasi yakni adanya program, target dan unsur pelaksana, ketiga hal tersebut telah dilakukan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola ormas dan menangani konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR di Jakarta. Program peningkatan peran

ormas, forum silaturahmi Forkopimda dengan ormas serta *workshop* tentang bela negara menjadi program rutin Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta pada ormas-ormas yang terdaftar di SKT dan aktif dalam forum silaturahmi yang termasuk di dalamnya ormas Pemuda Pancasila dan FBR.

Sebagai unsur pelaksana, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengelola konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR sebagai koordinator strategis dan membagi-bagi peran kepada aparat keamanan berwenang. Seperti pada patrol pemantauan keamanan di titik-titik yang rawan tawuran antara kedua ormas tersebut menjadi porsi pelaksanaan pihak Satpol PP dan Kepolisian. Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta menjalankan fungsinya untuk memimpin, mengarahkan dan membina program serta aksi strategis pemberdayaan ormas pada Bakesbangpol tingkat kota.

Peran Bakesbangpol sebagai lembaga pencegah konflik sosial sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pencegahan konflik sosial tersebut didefinisikan sebagai

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015.

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini¹⁵. Pencegahan konflik menjadi aspek yang paling krusial karena dapat mengurangi kemungkinan pecahnya sebuah konflik yang akan berujung pada korban jiwa dan kerugian material¹⁶. Peran lembaga dalam hal ini Bakesbangpol dipandang sebagai harapan-harapan yang diamanahkan kepada individu/lembaga yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan sosial.

Selanjutnya dalam menganalisis peranan pemerintah, teori peran digunakan sebagai *conceptual framework* penelitian ini. Peran dalam kehidupan sosial identik dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ini bermaksud bahwa harapan tersebut bermuatan kewajiban yang perlu dipertimbangkan untuk diwujudkan¹⁷.

Dalam pelaksanaannya, harapan-harapan dari masyarakat disampaikan kepada pemegang peran dan selanjutnya pemegang peran melaksanakan

kewajibannya untuk menjawab harapan-harapan dari masyarakat tersebut. Sehingga hubungan antara pemegang peran dan masyarakat sebagai pemilik harapan memiliki ketergantungan yang besar.

Pemegang peran pemerintah dalam penanganan konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR di Jakarta meliputi Kemendagri, Bakesbangpol, Satpol PP, TNI hingga Polri. Kemendagri dalam hal ini sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kuasa dalam hal pemberian ijin atau pengeluaran SKT bagi yang ormas yang terdaftar dan memenuhi syarat serta juga sebagai lembaga yang berhak melakukan pencabutan surat ijin atau SKT bagi ormas yang dianggap melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dengan adanya SKT, ormas yang telah terdaftar dianggap ormas legal yang berhak mendapatkan pemberdayaan dan penguatan baik moril maupun materil seperti bantuan dana dan hibah dalam kegiatan ormas tersebut. Hingga saat ini ormas Pemuda Pancasila dan FBR masih memiliki SKT resmi dan merupakan ormas

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

¹⁶ Lambang Triyono, *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-*

Konflik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

¹⁷ Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016).

legal yang berhak mendapatkan fasilitas dari pemerintah.

Mengenai penanganan konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR, kedua ormas tersebut sudah menjadi ormas yang memiliki catatan tersendiri dan masuk ke dalam ormas yang membutuhkan penanganan khusus dan perhatian lebih dari pemerintah. Berdasarkan regulasi yang tercantum pada Undang-Undang 7 Tahun 2012 dan Pergub DKI 258 Tahun 2016, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem regulasi berbasis koordinasi yang dalam hal ini lembaga pemerintah tersebut memiliki wewenang sebatas membina dan mengkoordinasikan elemen terkait dalam manajemen konflik antar ormas, khususnya pada level preventif¹⁸.

Proses mediasi atas konflik yang terjadi pada kedua ormas tersebut melewati beberapa tahap, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta membagi tugasnya pada pimpinan daerah dan biasanya memaksimalkan pada Bakesbangpol kota. Ketika proses mediasi di tingkat kota menemui jalan buntu, barulah Subbid Pemantauan dan Penanganan

Konflik Sosial bertindak sebagai mediator di skala Provinsi. Perlu dipahami bahwa mediasi baru hanya akan berjalan jika adanya permintaan dari kedua ormas tersebut terhadap pemerintah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan mediasi jika tidak adanya permintaan dari kedua ormas yang berkonflik atau salah satunya. Ketika konflik antar ormas telah menjadi tindakan pidana, maka Bakesbangpol mendelegasikan wewenang penanganan konflik sepenuhnya kepada aparat kepolisian setempat.

Pada aspek informal, Forum silaturahmi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola keberadaan ormas Pemuda Pancasila dan FBR di Jakarta sepanjang kurun waktu 2016-2018 sejauh ini secara umum berjalan, bahkan tidak hanya dengan kedua ormas ini, melainkan dengan ormas lainnya dan unsur masyarakat. Pemuda Pancasila dan FBR dianggap sebagai ormas yang memiliki interaksi baik terhadap pemerintah dan terbuka.

Kewenangan pada struktur organisasi Bakesbangpol Provinsi DKI

¹⁸ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Jakarta mulai dari satuan teratas hingga satuan terbawah khususnya yang berkaitan langsung dengan pembinaan dan pengelolaan ormas telah berjalan dengan struktur formal dan garis komando. Adanya dua Subbidang khusus yaitu Subbidang Ormas dan Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial pada Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta menjadi kekuatan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan Bakesbangpol lainnya. Dengan situasi kantor Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang meliputi sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan saat ini telah dibangun sistem SKT *online* dan mekanisme *cross check* dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Secara umum fasilitas kantor Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta nyaman dan mumpuni, teknologi yang digunakan pun cukup handal.

Menyangkut hubungan antar bagian, koordinasi baik secara internal Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta maupun eksternal dengan instansi lain dalam mengelola ormas dan menangani konflik antar ormas dilakukan melalui kegiatan teknis program kerja yang diadakan bersama oleh berbagai bidang. Adapun koordinasi eksternal tersebut

diadakan oleh Bakesbangpol dengan segenap SKPD, forum pimpinan daerah dan ormas. Meski demikian tidak lantas semua ormas dapat dirangkul begitu saja mengingat banyaknya jumlah ormas terdaftar yang ada di Jakarta.

Standar kinerja yang ditetapkan oleh Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengenai pengelolaan ormas mengerucut pada tiga poin yakni terdapatnya ormas di SKT, ormas aktif menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pembangunan serta mampu diberdayakan melalui sejumlah penguatan. Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta menggarisbawahi ketaatan ormas pada regulasi dan keaktifan ormas sebagai benefit pada jalannya pemerintahan.

Namun terdapat *impact* yang besar bagi keamanan nasional apabila terjadi konflik sosial antara kedua ormas besar tersebut. Maka dari itu Bakesbangpol harus *concern* pada asas ketaatan regulasi agar kedua ormas yang sering bertikai tersebut dapat lebih tertib dan beriringan dalam pembangunan daerah. Sejauh kedua ormas besar tersebut berkonflik, tanggung jawab sepenuhnya dikembalikan kepada ormas yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan paradigma Bakesbangpol yang bercokol

pada sosialisasi dan edukasi khususnya pada tingkat elit ormas dan belum mengarah pada intervensi sosial pemerintah daerah terhadap *common ground* ormas yang sering terlibat konflik.

Provinsi DKI Jakarta sebagai kawasan sentral Indonesia yang sangat plural tidak lepas dari ragam kepentingan yang dilandasi kondisi sosial historis sekelompok masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, pemerintah harus terus berusaha mengelola konflik agar tidak membawa kerugian yang besar bagi keamanan dan pertahanan negara. Sebagai produk laten masyarakat yang plural, konflik harus diantisipasi melalui kemampuan pemerintah untuk lebih jeli mengelola tatanan masyarakat agar tidak mudah terpecah belah.

Pada dasarnya, konflik merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mengembangkan organisasi, karena konflik tumbuh dari sebuah kedinamisan manusia dan sulit dihindari dalam proses kehidupannya. Maka dari itu seni dari manajemen konflik dalam situasi dan kondisi konflik sangat penting dan merupakan tugas yang paling berat bagi mereka terutama para pemimpin. Secara

umum Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta telah memiliki sistem manajemen konflik berbasis koordinasi, termasuk di dalamnya mengidentifikasi tipologi konflik. Namun demikian, perlu ditingkatkan lagi ketajaman identifikasi tersebut sebab pola-pola konflik khususnya antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR terus berlarut-larut dan konflik antara kedua ormas tersebut tidak lagi dapat dikatakan sebagai konflik warga biasa.

Dalam kajian kriminologi, konflik antar kelompok jika dibiarkan terus menerus dapat menjadi *organized crime* yang berbahaya¹⁹. Konflik antar ormas menjadi berbeda dengan konflik kelompok lain dikarenakan ormas terlebih lagi pada kedua ormas besar yakni Pemuda Pancasila dan FBR memiliki tingkat solidaritas yang diafirmasikan melalui *common ideas* seperti kesukuan, agama dan seterusnya. Pada tingkat akar rumput, kesamaan tersebut bergeser ke tataran yang lebih empiris yakni ketidakberdayaan masyarakat terutama dari segi perekonomian yang kemudian terekspresikan melalui aksi-aksi konflik dengan membawa nama ormas.

¹⁹ Iqrak Sulhin, "Land/Forest Fire in the Perspective of Catastrophic Criminology", *Jurnal KnE Social Sciences*, 2018, hlm 386-406.

Menurut Kartini Kartono, manajemen konflik dapat dijalankan dengan cara membuat standar-standar penilaian, menemukan masalah-masalah kontroversial dan konflik-konflik, menganalisa situasi dan mengadakan evaluasi terhadap konflik, serta memiliki tindakan-tindakan yang tepat untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan yang ada²⁰. Langkah-langkah tersebut harus diperhatikan oleh Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta ke depan sebab pola-pola pencegahan konflik antara Pemuda Pancasila dan FBR dengan model sosialisasi dan edukasi dianggap sukar menembus fragmentasi perpecahan ormas di level akar rumput.

Dengan melihat anatomi dan melakukan berbagai tindakan berdasarkan analisis tersebut, Bakesbangpol diharapkan mendapatkan solusi agar konflik dapat terselesaikan. Konflik seringkali pecah akibat informasi yang bias, sehingga pihak yang berkonflik perlu diajak berdiskusi guna memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing agar konflik dapat terselesaikan. Di sinilah peran strategis Bakesbangpol dalam mendudukan posisi antar ormas.

²⁰ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Sejauh ini Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kegiatan tersebut pada kedua ormas yang bertikai melalui forum silaturahmi dan komunikasi. Kegiatan tersebut hanya perlu dioptimalkan dan diperluas agar semua anggota ormas yang berkonflik di Jakarta merasakan rekognisi yang sama. Sehingga sentimen antar ormas pada level akar rumput dapat diredam bahkan dicegah agar tidak tereskalasi sebagai konflik. Sebab berdasarkan hasil penelitian ini, tidak lantas semua anggota ormas Pemuda Pancasila ataupun FBR di Jakarta mendapatkan kesempatan untuk mengikuti audiensi ataupun diskusi dengan Bakesbangpol. Kebanyakan dari undangan yang ada hanya diikuti oleh ketua ormas ataupun pimpinan cabang.

Sebagai proses yang tidak terhindarkan, konflik hadir lantaran kepentingan yang inkompatibel, serta kolektivitas berlawanan yang diekspresikan dalam sejumlah bentuk²¹. Kapasitas aktor berwenang dalam mengelola konflik sangatlah penting diperhatikan dalam manajemen konflik. Faktor identitas seringkali menjadi justifikasi atas gesekan sosial yang

²¹ H.W. Jeong, *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. (London: Sage Publication Ltd, 2008).

digunakan sebagai bahan agitasi politis untuk memecah konflik.

Dalam konteks penelitian ini, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta idealnya mampu melakukan lima tahapan manajemen konflik, yakni 1) identifikasi inkompatibilitas antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR, 2) pemahaman pola konflik yang terjadi antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR, 3) negosiasi perbedaan nilai antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR dan 5) pembentukan hubungan baru antara kedua ormas yang sering berkonflik tersebut. Rangkaian rekonsiliasi perlu dilakukan secara kontinu oleh aktor manajemen konflik yang berwenang.

Berdasarkan penelitian di lapangan, sepanjang tahun 2016-2018 fokus pembinaan dan pengelolaan ormas yang dilakukan oleh Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta berhenti pada tahap 2, tahap 3, 4 dan 5 dirasa belum dilakukan sepenuhnya secara optimal. Mengingat kedua ormas ini sudah berkonflik sejak lama, simbol-simbol eksklusif yang melekat pada pengalaman sejarah antara kedua ormas

tersebut ke depannya masih menjadi *trigger* yang harus diantisipasi.

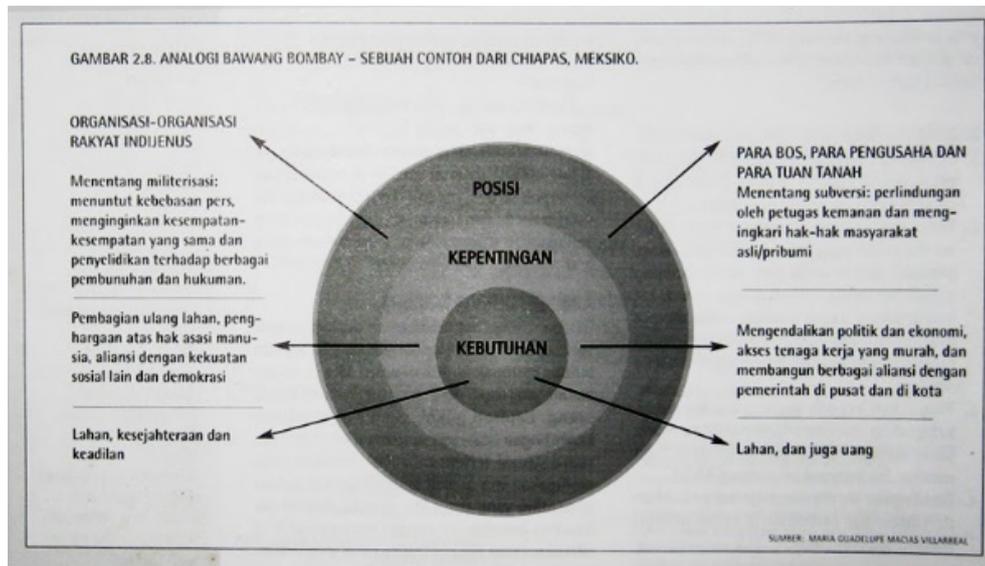
Upaya Pemerintah dalam Penanganan Konflik Antara Ormas Pemuda Pancasila dan FBR di Jakarta Tahun 2016-2018

Dalam upaya penanganan konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR di Jakarta, pemerintah harus memetakan dan menganalisa konflik untuk melihat permasalahan mendasar yang muncul dalam konflik tersebut, terutama pada faktor-faktor yang memicu dan membuat konflik semakin membesar. Melalui model kupas bawang²², pemerintah dapat melihat posisi dari pihak yang berkonflik dalam hal ini ormas Pemuda Pancasila dan FBR. Bakesbangpol pun menyadari bahwa yang menjadi kebutuhan dari pihak yang berkonflik saat ini dikarenakan oleh masalah perekonomian pada tingkat akar rumput.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan ormas yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap ormas-ormas tersebut sudah dilakukan sesuai ketentuan namun tidak semua dapat mengakomodir keinginan masyarakat.

²² R. Fisher, W. Ury, & B. Patton, *Getting to Yes; Negotiating Agreement without Giving in*

Second Edition, (New York: Penguin Books, 1991).



Gambar 2. Model Kupas Bawang

Sumber: Coltri dalam *Alternative Dispute Resolution: A Conflict Diagnosis Approach* (2010).

²³Program binaan dan pemberdayaan ormas yang dilakukan saat ini terbatas pada tataran petinggi ormas saja dan belum menyentuh tingkat akar rumput. Padahal tingkat akar rumput lah yang sering begesekan sehari-hari di lapangan. Sehingga ketika Bakesbangpol merangkul kedua ormas tersebut, yang disebut ormas Pemuda Pancasila dan FBR hanya representasi petinggi ormas yang tidak mewakili kondisi empiris pelaku konflik ormas yakni level akar rumput.

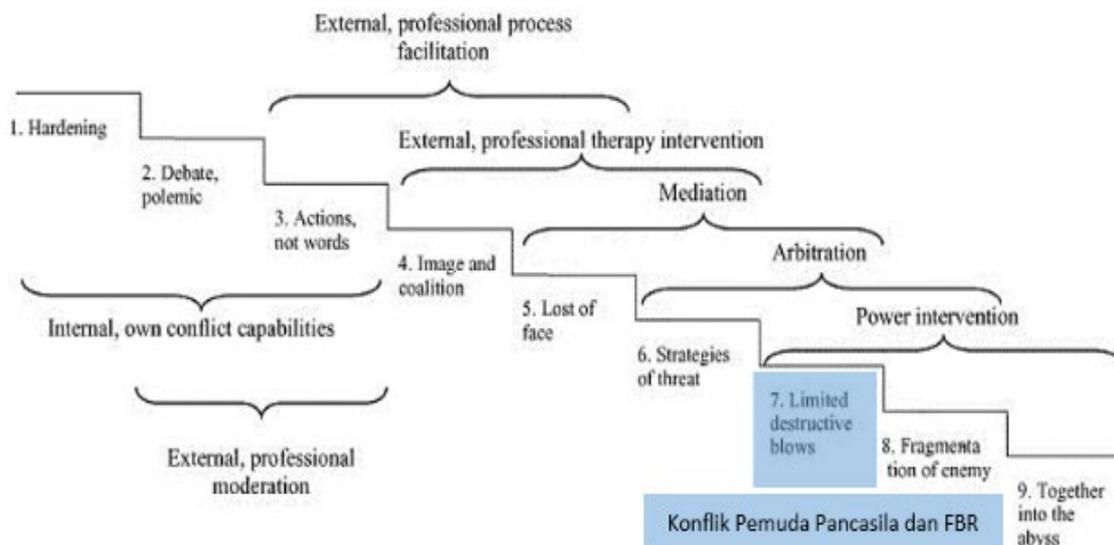
Penanganan pemerintah dalam mengintervensi secara tepat dalam mencegah munculnya eskalasi konflik antara kedua ormas tersebut pun terbatas pada kebijakan Undang-Undang. Jika melihat eskalasi konflik yang terjadi antara Pemuda Pancasila dan FBR

berdasarkan teori *Glasl's*, beberapa konflik yang terjadi antara kedua ormas tersebut ada yang mencapai pada tahap ketujuh yaitu *Limited destructive blows*, dimana muncul serangan-serangan yang tidak berprikemanusiaan yang berujung *violence*²⁴. Konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR dapat dikatakan mencapai tahapan ketujuh mengingat sudah ada timbulnya korban jiwa atas bentrok yang terjadi antara kedua ormas tersebut.

Secara internal, penyelesaian konflik dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam konflik tersebut. Namun secara eksternal penyelesaian dilakukan oleh pihak-pihak profesional baik fasilitator, mediator, arbitrator atau bahkan menggunakan

²³ S. Coltri, *Alternative Dispute Resolution: A Conflict Diagnosis Approach*, (New Jersey: Prentice Hall, 2010).

²⁴ Friedrich Glasl, *Confronting Conflict*, (Bristol: Hawthorn Press, 1999).



Gambar 3. Tahapan Glas's Konflik Pemuda Pancasila dan FBR
 Sumber: Glas's Conflict Escalation Model (1999) Diolah peneliti

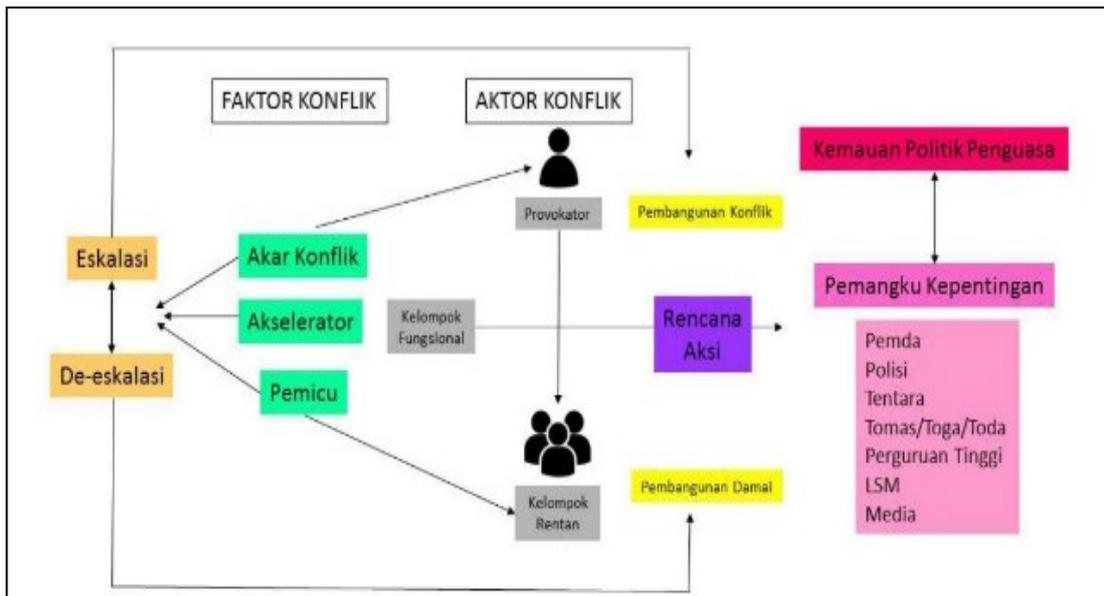
kekuatan dalam intervensi. Di lihat dari tahapannya, konflik antara Pemuda Pancasila dan FBR memerlukan adanya *power intervention*.

Pada konflik yang menysar level akar rumput, pemerintah turut meminta bantuan terhadap petinggi ormas untuk memberdayakan setiap anggota-anggotanya. Pemerintah dalam hal ini Bakesbangpol dan Kemendagri tidak dapat melakukan mediasi antara kedua ormas tersebut tanpa diminta oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Mediasi yang terjadi di lapangan ketika kedua ormas tersebut berkonflik dapat dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun mediasi yang terjadi tidaklah menyelesaikan konflik hingga ke akar melainkan hanya sebatas penentuan keputusan dalam melakukan sanksi pidana, apakah konflik akan

berlanjut ke pengadilan atau berakhir damai dengan catatan bukanlah damai yang positif.

Pada dasarnya konflik dapat berkembang dan bertransformasi baik ke arah yang lebih positif ataupun ke arah yang lebih negatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi latar belakang konflik serta peran dari aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik. Cara yang tepat dalam mencegah konflik dan rekonsiliasi konflik dapat ditemukan dengan menganalisis kerangka dinamis konflik secara mendalam melalui lima komponen utama yaitu tingkat eskalasi dan de-eskalasi, faktor konflik, aktor konflik, *stakeholder* dan kemauan politik penguasa²⁵.

²⁵ Ichan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: Gramedia, 2017).



Gambar 4. Kerangka Dinamis

Sumber: Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik dalam buku Jembatan Perdamaian (2017)

Dalam faktor konflik, terdapat 3 elemen yaitu akar konflik, akselerator konflik dan pemicu konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber konflik utama dan paling mendasar pada konflik yang terjadi antara Pemuda Pancasila dan FBR adalah masalah perebutan lahan dalam hal ini perekonomian serta eksistensi. Posisi markas kedua ormas tersebut seringkali berdekatan sehingga bisa dipastikan hampir di setiap tempat yang terdapat markas kedua ormas tersebut akan mudah terjadi gesekan dalam hal perebutan lahan. Rasa ingin menguasai suatu tempat karena kebutuhan ekonomi seharusnya tidak perlu terjadi apabila kedua ormas tersebut dapat berbagi secara adil atau tidak merasa iri terhadap masing-masing ormas.

Pada komponen aktor konflik, terdapat tiga kategori yang memberi kontribusi terhadap terjadinya konflik, yaitu provokator, kelompok rentan dan kelompok fungsional. Sebagai kelompok

rentan, kondisi perekonomian kedua ormas pada level akar rumput ini seringkali dimanfaatkan oleh para oknum politik dalam mencari massa.

Seperti yang dikemukakan oleh Merton²⁶, peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Dalam hal ini, para oknum politik beranggapan bahwa sebuah organisasi besar tentu memiliki jumlah massa yang banyak. Banyaknya massa ini diharapkan dapat menjadi lumbung suara bagi para oknum politik dengan harapan para pelaku politik tersebut akan meraup suara sebanyak-banyaknya. Selanjutnya anggota ormas pun mengharapkan adanya sebuah kompensasi dari

²⁶ Raho Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm 67.

kewajibannya yang telah dilaksanakannya.

Hal ini lagi-lagi berkaitan dengan kebutuhan ekonomi yang menjadi ketergantungan para anggota ormas. Dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak dan rasa solidaritas yang tinggi, tentu hal ini akan serta merta membuat anggota ormas merasa harus melakukan pembuktian diri yang berujung pada munculnya bentrok.

Di sinilah peranan pemerintah sebagai *stakeholder* atau pemangku kepentingan untuk dapat menghentikan konflik yang terjadi. Berdasarkan kebijakan di Indonesia terkait penanganan konflik, sejauh ini pemerintah sudah mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, dimana penanganan konflik sosial melalui keterpaduan baik antar aparat pusat, antar aparat daerah maupun antar aparat pusat dan daerah dilakukan agar penanganan konflik sosial lebih efektif dan efisien²⁷.

Dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial Nomor 7

Tahun 2012, inisiatif dan keterlibatan pemerintah dalam hal ini Bakesbangpol dan aparat pemerintahan sudah mencakup pencegahan konflik serta penghentian konflik²⁸. Namun pada tahap pemulihan pasca konflik dirasa belum cukup optimal, sehingga perlu adanya evaluasi terhadap upaya-upaya pemulihan pasca konflik dengan mempertimbangkan metode alternatif untuk mencegah terjadinya kembali konflik antara kedua ormas tersebut. Diperlukan tindakan menyeluruh yang mengkaitkan antara kekuatan politik, ekonomi atau sosial yang positif dengan mengedepankan perilaku yang lebih kooperatif antara masing-masing pihak ormas.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal penanganan konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR meliputi pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan ormas. Pada tataran pengelolaan dengan sasaran agar kedua ormas tersebut mampu kuat dan kooperatif sehingga membawa implikasi

²⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

damai dan potensi konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR dapat diminimalisasi.

Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan ormas meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan tugas-tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi pemantapan integrasi bangsa, pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan.

Sepanjang tahun 2016-2018, Bakesbangpol telah melaksanakan tata kelola keberadaan ormas dan penanganan konflik antar ormas di Jakarta yang termasuk di dalamnya konflik antara Pemuda Pancasila dan FBR. Program yang dijalankan meliputi peningkatan peran ormas, pendaftaran SKT, forum silaturahmi Forkopimda dengan ormas serta *workshop* bertema Pancasila dan bela negara. Program-program manajemen ormas selama ini bernuansa sosialisasi dan edukasi, sedangkan konflik sosial antar ormas yang menjadi *impact* dari keberadaan ormas belum menjadi *starting point* identifikasi dan perancangan kegiatan teknis ormas.

Dalam melakukan manajemen konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR di Jakarta, Bakesbangpol bekerja sama dengan unsur pemerintahan yang terkait mulai dari pimpinan daerah tingkat kelurahan, kecamatan hingga kotamadya. Pada aspek pemantauan, penindakan dan penegakan kondusifitas, kerja sama dilakukan dengan aparat Satpol PP, TNI dan Polri. Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta menjalankan perannya untuk memimpin, mengarahkan dan membina program serta melakukan aksi strategis pemberdayaan ormas dengan mengembangkan sistem deteksi konflik melalui Subbidang Penanganan Konflik Sosial.

Dalam penanganan konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan FBR di Jakarta, pemerintah melakukan upaya yang meliputi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan ormas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan tidak semua dapat mengakomodir keinginan masyarakat dan tidak tepat sasaran. Program-program yang dijalankan sejauh ini hanya melibatkan anggota ormas Pemuda Pancasila dan FBR pada level petinggi atau pejabat organisasi dan belum

menyentuh tingkat akar rumput, padahal anggota ormas yang bermasalah atau sering terlibat konflik di lapangan berada pada level akar rumput.

Program-program yang dijalankan sejauh ini hanya melibatkan anggota ormas Pemuda Pancasila dan FBR pada level pejabat organisasi dan belum menyentuh tingkat akar rumput, padahal anggota ormas yang bermasalah atau sering terlibat konflik di lapangan berada pada level akar rumput.

Inisiatif dan keterlibatan pemerintah dalam hal ini Bakebangpol dan aparat pemerintahan sudah mencakup pencegahan konflik serta penghentian konflik. Namun pada tahap pemulihan pasca konflik dirasa belum cukup optimal. Upaya pemerintah untuk melakukan mediasi hanya dapat dilakukan jika kedua ormas tersebut meminta untuk mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian apabila terjadi konflik di lapangan tidaklah menyelesaikan konflik hingga ke akar, melainkan hanya sebatas penentuan keputusan dalam melakukan sanksi pidana. Sehingga upaya penanganan konflik yang selama ini dilakukan hanya berhenti pada perdamaian negatif.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah perlu mereformulasikan

kegiatan teknis tahunan yang mencakup program pembinaan hingga pemantauan dan penanganan konflik ormas dengan menambahkan subjek sasaran pembinaan yang menasar pada anggota ormas level akar rumput.

Untuk mengurangi permasalahan yang disebabkan oleh anggota ormas level akar rumput, pemerintah dapat melakukan pelatihan pekerjaan yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja atau Balai Latihan Kerja sehingga anggota-anggota ormas dapat mandiri dan terberdayakan perekonomiannya. Sehingga kemudian dapat mampu bertransformasi sebagai pengawal pemerintah dan berkontribusi dalam pembangunan kota.

Pemerintah juga dapat menjalin kerja sama dengan media massa untuk turut memberitakan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh ormas mengingat pengaruh media massa terhadap masyarakat saat ini sangat besar. Dengan adanya pemberitaan positif seperti kegiatan pengajian massal, santunan terhadap anak yatim atau gotong royong antar ormas pada pembangunan jalan secara terus menerus, maka masing-masing anggota ormas diharapkan menjadi berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan

berguna bagi keberlangsungan dan perdamaian negara.

Sedangkan kepada para petinggi ormas Pemuda Pancasila maupun FBR, sebaiknya turut serta melakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada seluruh anggota dan memberikan sanksi berat terhadap anggota ormas yang berkonflik, serta lebih selektif dalam hal penerimaan setiap anggota yang akan bergabung dalam keanggotaan ormas.

Daftar Pustaka

Buku

- Bernard, Raho (2007). *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Hal 67.
- Bungin. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Coltri, S. (2010). *Alternative Dispute Resolution: A Conflict Diagnosis Approach*. New Jersey: Prentice Hall.
- Creswell, John W. (2008). *Educational Research, Planing, Conducting and Evaluating, Qualitative and Quantitative Approach*. London: Sage Publications. Hal. 286.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (1991). *Getting to Yes; Negotiating Agreement without Giving in Second Edition*. New York: Penguin Books.
- Glasl, Friedrich. (1999). *Confronting Conflict*. Bristol: Hawthorn Press.
- Jeong, H.W. (2008). *Understanding Conflict and Conflict analysis*. London: Sage Publication Ltd.

Kartono, Kartini. (2016). *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Malik, Ichsan. (2017). *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Gramedia.

Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (ed. 22)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 5.

Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. Hal. 73.

Sujarweni. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers. Hal 31.

Suhardono, Edy. (2016). *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Triyono, Lambang. (2007). *Pembangunan sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Sulhin, Iqraq. (2018). "Land/Forest Fire in the Perspective of Catastrophic Criminology". *Jurnal KnE Social Sciences* edisi Agustus 2018. Halaman 386-406.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan/Keputusan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
No. 258 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2015.

Website

Briantika, Adi. (2018). Serangan Pemuda
Pancasila ke Markas FBR & Warisan
Dendam di Jakarta. Diakses dalam
laman pada
<https://tirto.id/serangan-pemuda-pancasila-ke-markas-fbr-warisan-dendam-di-jakarta-cYPb> tanggal 22
Januari 2020.

